

Table Of Content

Journal Cover 2

Author[s] Statement 3

Editorial Team 4

Article information 5

 Check this article update (crossmark) 5

 Check this article impact 5

 Cite this article 5

Title page 6

 Article Title 6

 Author information 6

 Abstract 6

Article content 7

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC

**PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol 19 No 4 (2024): November

DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1188>

Article type: (Management Accounting)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Digital Official Letter Management Using E-Buddy Sidoarjo Application

Pengelolaan Surat Resmi Digital Menggunakan Aplikasi E-Buddy Sidoarjo

Mukhammad Ulil Albab, isnaagustina@umsida.ac.id, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Isna Fitria Agustina, isnaagustina@umsida.ac.id, (1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

Background: The rise of digital technology has revolutionized local governance by enhancing efficiency and transparency. **Specific Background:** In this context, the E-Buddy application facilitates the digital management of official correspondence, yet its effectiveness has not been thoroughly examined. **Knowledge Gap:** Current literature lacks a detailed analysis of the communication dynamics and bureaucratic structures affecting the success of such digital systems. **Aims:** This study investigates the implementation of the E-Buddy application, emphasizing communication, resource allocation, executor disposition, and bureaucratic structure. **Results:** Findings reveal that the application's effectiveness is undermined by limited feature utilization and insufficient adherence to standard operating procedures (SOPs), resulting in miscommunication and inefficiencies. **Novelty:** The research underscores the importance of effective communication and structured SOPs in optimizing digital systems in governance. **Implications:** The study recommends enhancing training and establishing clear SOPs to improve implementation outcomes and contribute to more effective governance.

Highlights :

- Effective communication is crucial for successful implementation.
- Insufficient adherence to SOPs hampers operational efficiency.
- Training and support enhance user engagement and application effectiveness.

Keywords: Digital Governance, E-Buddy Application, Implementation, Communication, Bureaucratic Structure

Published date: 2024-10-04 00:00:00

Pendahuluan

Di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Semakin tinggi teknologi komunikasi yang digunakan akan semakin mempercepat proses penyampaian informasi. Perkembangan informasi pun sudah merambat ke era digital, informasi yang dahulu masih diolah dengan cara konvensional sekarang telah dikelola dengan teknologi komputer, data-data yang dulu hanya diolah dan disimpan dalam arsip berupa buku (Paper Base), kini sudah di olah dengan sistem komputer dan disimpan dalam bentuk file digital. Arsip merupakan salah satu produk pekerjaan kantor (office work) selain surat, formulir dan laporan .

Secara umum, bidang administrasi berupa pengelolaan surat menyurat menjadi hal mendasar dalam setiap pelaksanaannya, sehingga membutuhkan proses pengelolaan secara cepat, tepat dan tertata. Sebagaimana menurut penerapan sistem kerja baru berbasis teknologi digitalisasi memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi pekerjaan dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Surat dinas merupakan jenis surat yang berisi berbagai informasi kedinasan termasuk penyampaian naskah dinas, pemberitahuan, pernyataan, permintaan dan hal kedinasan lainnya kepada pihak luar. Menurut KBBI, surat dinas merupakan surat yang dikirimkan secara langsung oleh kantor pemerintahan dan bebas biaya. Selain itu, surat dinas merupakan alat komunikasi resmi yang memiliki kekuatan hukum. Surat dinas dalam instansi, lembaga, organisasi maupun perusahaan bisa dijadikan sebagai bukti historis yang mengingatkan akan kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait. Karena perannya yang sangat penting maka dibutuhkan aplikasi surat menyurat yang mendukung.

Aplikasi surat menyurat dinas menjadi solusi yang menjawab berbagai kebutuhan surat menyurat di berbagai lembaga dan instansi. Adanya aplikasi surat menyurat memudahkan proses korespondensi surat dinas sekaligus pengelolaan hingga pengarsipan surat. Sesuai dengan UU Nomor, 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang pelayanan publik melalui dinas KOMINFO (Komunikasi dan Informatika).

E-Buddy Sidoarjo merupakan salah satu produk berupa aplikasi surat menyurat sebagai bentuk penerapan *e-Government* di Kabupaten Sidoarjo. Selain merupakan aplikasi surat menyurat, *E-Buddy* juga dikembangkan untuk manajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo mulai dari absensi hingga kegiatan rapat. Aplikasi ini juga membantu pengolahan informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam sebuah dashboard, sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat aktivitas ataupun kegiatan secara lebih transparan yang salah satunya bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan surat menyurat dinas. Kebutuhan administrasi terfasilitasi dengan lebih efektif melalui adanya aplikasi *E-Buddy*. Landasan hukum dibuatnya aplikasi *E-Buddy* didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.

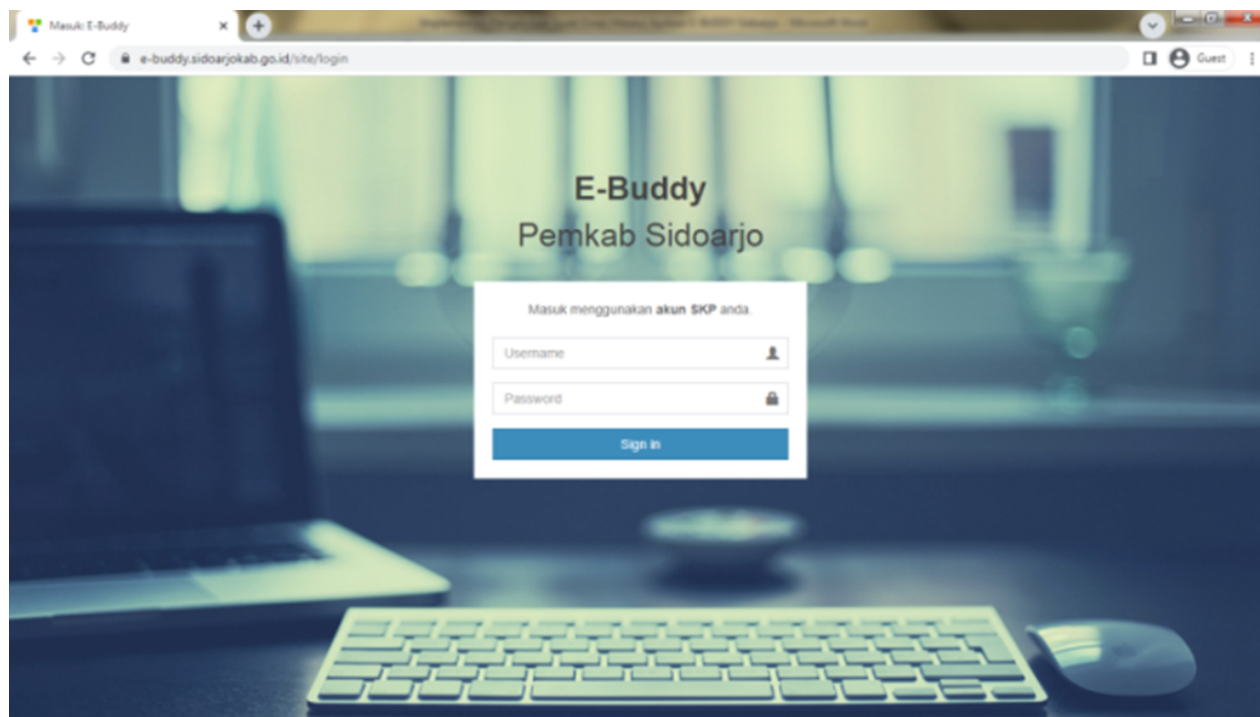


Figure 1. Halaman Login Website E-Buddy

Salah satu Desa yang telah menerapkan penggunaan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo yakni Jabon, dalam penerapannya aplikasi tersebut digunakan pada pengelolaan surat menyurat dinas yang masuk dan keluar, kemudian digunakan juga untuk mendisposisi surat dan digunakan sebagai media untuk pencatatan presensi kehadiran aparatur Pemerintah Desa. Aplikasi ini dioperasikan oleh 1 (satu) admin di desa. Adapun dalam pelaksanaannya apabila ada surat masuk dari OPD lain untuk pemerintah Desa Kedungrejo maka surat tersebut secara otomatis terkirim pada akun *E-Buddy* Pemerintah Desa Kedungrejo yang dimana akses admin yang bertanggung jawab ialah Kaur Tu dan Umum, kemudian jika terdapat surat masuk dari OPD lainnya, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, untuk bagian disposisi hanya bisa dilakukan oleh admin yang dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Kaur TU dan Umum.

Dalam aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo, terdapat 3 (tiga) menu utama, yakni, surat masuk, surat keluar dan presensi, menu surat masuk digunakan Admin *E-Buddy* untuk surat keluar setiap instansi memiliki konsep tersendiri atau bisa juga dengan template yang dapat di download dengan file berekstensi .docx di dalam aplikasi *E-Buddy* dan operator bisa memanfaatkan *Microsoft Word* untuk merubah konteks surat sesuai dengan konsep surat yang akan dibuat. Pada pengiriman surat keluar, surat harus terformat .docx agar dapat terupload di *E-Buddy* yang dimana didalamnya disertakan nomor dan barcode tanda tangan elektronik sesuai dengan format dari surat *E-Buddy*. Adapun rekap data Surat masuk, surat keluar maupun presensi pada Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon periode 2022 dan 2023 sebagaimana data berikut ini :

No	Menu	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	Surat Masuk			
	Surat Terdisposisi	208	317	372
2	Surat Keluar			
	Surat Terkirim	17	18	27
	Surat Tidak Terkirim	150	130	120
3	Presensi			
	Kepala Desa	2	-	-
	Sekdes	10	-	-
	Kasi Pelayanan	1	-	-
	Kasi Pemerintahan	-	-	-
	Kasi Kesra	-	-	-
	Kaur Perencanaan	1	-	-
	Kaur Keuangan	11	-	-
	Kaur TU & Umum	1	-	-
	Kasun	-	-	-

Table 1. Rekapitulasi Surat Masuk, Surat Keluar dan Presensi Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon telah menggunakan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo sejak tahun 2022 hingga saat ini sebagai sarana pengelolaan surat masuk, surat keluar maupun presensi kehadiran pegawai, namun dalam praktek penggunaan aplikasi tersebut menemukan kendala yang dihadapi. mulai dari keterbatasan SDM hingga kelemahan dari system, namun seluruh pegawai tetap mengusahakan untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Penggunaan teknologi modern dalam administrasi dan ketatausahaan dapat membantu memudahkan proses pengelolaan surat-menyurat dan meningkatkan efisiensi organisasi. Implementasi teknologi modern dalam administrasi memungkinkan proses pengelolaan surat-menyurat, termasuk surat dinas, dapat diselesaikan secara cepat dan akurat. Selain itu, teknologi aplikasi dapat membantu meningkatkan kualitas produktivitas kerja dan membantu pemerintah serta instansi swasta dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif.. beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik meliputi empat unsur utama yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi George Edward III dalam (Mening Subekti, 2017) . Dalam penelitian ini, model G Edward III akan digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan surat dinas berbasis digital melalui aplikasi *E-Buddy*, adapun hasil dari implementasi aplikasi *E-Buddy*dimasing-masing OPD terdapat pada penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Kristyanita Yefani, M. Mas'ud Said, Suyeno pada tahun 2021 . Yang berjudul Implementasi E-SURADI (Surat Digital) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui implementasi e-suradi (surat digital) dalam mewujudkan good governance di Kota Malang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-suradi tersebut, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif , Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-suradi yang berada di Kota Malang sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III karena sudah memenuhi keempat variable dalam model

implementasi kebijakan yang sudah diisyaratkan dalam hal pelaksanaan seperti halnya komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Selain itu e-surat juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance. Persamaan pada penelitian ini yakni menggunakan teor penelitian yang sama yaitu model Gorge Edward III Adapun perbedaannya yaitu lokasi dan lingkup penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan pada lingkup pemerintah kota sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada lingkup pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh An Nisa Nur Amalia, Afifudin, Hayat pada tahun 2019 yang berjudul *Implementasi E-Documen Dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar (Studi Kasus Kebijakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Bagian Umum Balai Kota Malang, Jawa Timur)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dengan pengelolaan surat masuk keluar dengan menggunakan e-dokumen. Apalagi perkembangan teknologi jaman sekarang sudah tidak diragukan lagi, banyak berbagai macam teknologi canggih yang bisa digunakan manusia agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adaon hasil dari penelitian ini enunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan surat dengan berbasis teknologi yang modern, ditambah dengan banyaknya surat masuk yang datang dituntut pengelolaannya harus semaksimal mungkin.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Nizar Frhansyah, Heru Irianto, Ali Fahmi (2022) yang berjudul *Implementasi Aplikasi E-Surat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aplikasi E-Surat dalam pelaksanaan system disposisi online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pihak kedinasan dan juga pemerintah kota surabaya telah mengimplementasikan E-Surat dalam birokrasi Internal dan pengelolaan tata kedinasan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Surat telah melakukan berbagai bentuk kegiatan guna mendukung kelancaran kebijakan sistem E-Surat. Salah satunya adalah melakukan kegiatan dengan membiasakan menggunakan Disposisi dan juga penggunaan aplikasi surat Nota Dinas Digital.

Berdasarkan observasi penulis yang dilakukan di Kantor Desa Kedungrejo menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo masih menemui kendala terutama dalam sistem pendisposisian surat masuk yang lebih memanfaatkan fitur *Chatting* melalui aplikasi *Whatsapp Grup*, beberapa faktor diketahui dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya kurangnya kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis secara merata terhadap para pengguna aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo dan kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sampel informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposiv sampling*, informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jabon, dan Kepala Desa yang mempunyai keterkaitan dengan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi pengelolaan surat dinas berbasis digital melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman sebagai pedoman. Model ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) sebagai jawaban dari perumusan masalah kajian implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Peneliti menggunakan model interaktif Miles & Hubberman karena model ini dapat membantu dalam mengelola data kualitatif dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari George C. Edward II dimana terdapat empat variable yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, Adapun variable tersebut yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Dari keempat variable model implementasi kebijakan ini guna untuk mengatur pelaksanaan implementasi pengelolaan surat dinas melalui aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo. Hal ini dapat diukur atau dilihat mulai dari :

A. Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu unsur yang erat kaitannya dengan keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa kebijakan publik akan berhasil dilaksanakan dengan baik dan efektif apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan atau program dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi erat kaitannya dengan penyampaian sebuah informasi, hal ini perlu disampaikan kepada

implementator atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, serta kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif. Adapun dalam implementasi aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo telah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan fitur disposisi surat yang ada pada aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo sebagai sarana penerus informasi kepada pihak yang dibebankan tugas, sehingga hal ini tidak jarang menjadikan sebuah masalah atau *miscommunication*. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pengguna aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo.



Figure 2. Bimtek implementasi aplikasi *E-Buddy* di Lingkungan Pemerintah Kab . Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatukhah selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diperoleh bahwa "memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan sebuah perubahan, seperti kita ketahui bersama jika selama ini kita menggunakan system pengelolaan surat dinas secara manual itu cukup membutuhkan energi lebih, tentunya untuk mengawal penggunaan aplikasi ini yang jelas setiap tahun kita akan mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi *E-Buddy* Sidoarjo ke semua desa yang ada di Kecamatan Jabon".



Figure 3. Monev implementasi aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo oleh Pemerintah Kecamatan Jabon

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan bagi unsur pemerintah desa juga segera beradaptasi atas penerapan sebuah kebijakan, hal ini tentu juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak [14] tidak terkecuali oleh Kepala Desa Kedungrejo, bapak Yahya Dahari, S.H yang menyatakan "saya menyambut gembira dengan

adanya kegiatan bimtek maupun monev dari pemerintah daerah terkait penerapan penggunaan E-Buddy Sidoarjo ini, sudah menjadi hal yang wajar apabila kita diawal masih belum terlalu faham betul, kami harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu saran untuk kita berkomunikasi demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo". Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kedungrejo secara bertahap mempunyai kemauan untuk menerapkan penggunaan aplikasi E-Buddy Sidoarjo sebagai sarana pengelolaan surat dinas.

Aplikasi surat digital tentunya memanfaatkan teknologi informasi yang dalam penerapannya pasti berhubungan dengan jaringan internet. Menurut hasil wawancara oleh Kepala Desa Kedungrejo bahwa "salah satu kendala yang kami rasakan saat ini mungkin keterbatasan jaringan internet". Implementasi Aplikasi E-Buddy Sidoarjo sebagai sarana pengelolaan surat dinas di Desa Kedungrejo sebenarnya sudah didukung baik oleh Kepala Desa, namun masih didapati kendala yang telah disebutkan oleh Bapak Yahya Dahari S.H yakni terkendala oleh jaringan internet sehingga ini dapat mempengaruhi dari beberapa aspek, misalkan terjadinya kesalahan dalam penerimaan informasi pada saat kegiatan bimtek maupun sosialisasi secara online dan pemrosesan surat masuk dan keluar, serta proses penginputan presensi kehadiran pegawai. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I. U. C. Etri (2021) [8] yang berjudul Implementasi E-SURADI (Surat Digital) Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang yang menyatakan bahwa setiap kebijakan dapat dijalankan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh OPD,

B. Sumber Daya Sumber daya yang dimaksud disini ialah meliputi ketersediaan staf (tenaga kerja) dan fasilitas fisik (fasilitas sarana dan prasarana) yang secara langsung dapat mendukung proses implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yahya Dahari, S.H selaku Kepala Desa Kedungrejo diperoleh bahwa "untuk ketersediaan sumber daya manusia, di Desa Kedungrejo ini bisa terbilang kurang ya, karena yang cukup mumpuni disini hanya setengah dari jumlah perangkat desa, untuk sisanya bergantung kepada teman-teman yang mampu, namun untuk ketersediaan sarana dan prasarana kita sangat mencukupi, karena disetiap ruangan terdapat computer yang dapat beroperasi, jaringan internet juga lumayan lancar". Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi E-Buddy Sidoarjo terutama dari ketersediaan Sumber Daya Manusianya.

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Yahya Dahari, S.H	Kepala Desa	S1
2.	Mukhlis Rokhmawan, S.Kom	Sekretaris Desa	S1
3.	Jawiyah, S.H	Kaur Keuangan	S1
4.	Herman Felani	Kaur Perencanaan	SLTA
5.	Mukhammad Ulil Albab	Kaur TU dan Umum	SLTA
6.	Hidayat	Kasi Pelayanan	SLTA
7.	Nur Nawawi	Kasi Pemerintahan	SLTA
8.	Tajjudin	Kasi Kesra	SLTA
9.	Basuni	Kasun	SLTA
10.	Muhammad Idrus Husni, S.Pd	Kasun	S1
11.	Junaedi	Kasun	SLTA
12.	Rifa'i	Kasun	SLTA
13.	Anwarudin	Kasun	SLTA
14.	Purwanto	Kasun	SLTA

Table 2. Daftar pengguna E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon

Penentuan Kriteria Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana aplikasi E-Buddy tidak mempunyai banyak kualifikasi Tidak ada Batasan umur, pria maupun wanita dapat mengoperasikan aplikasi tersebut asalkan mempunyai latar belakang teknologi komunikasi dan informasi serta dapat mengoperasikan computer. Hal ini dapat dikatakan sebagai ketidak efektifan karena pada kenyataannya masih ada SDM yang saat ini tidak memiliki latar belakang kemampuan untuk hanya mengoperasikan computer, ini dapat terjadi karena masih terdapat ASN yang mempunyai usia yang dapat dikatakan sudah tidak produktif. Hal ini selaras dengan pernyataan narasumber Ibu Fatukhah selaku Ksubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jabon yang menyatakan bahwa "untuk lebih optimalnya kit ^{SDM} yang bertugas sebagai operator E-Buddy untuk desaitu yang mendasar, karena mereka masih melekat teknologi". Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 hanya mengatur tentang tugas pokok operator E-Buddy Sidoarjo yang dibebankan kepada Kaur TU dan Umum Desa, tanpa disertai persyaratan atau ketentuan lain sebagai syarat untuk menjadi operator E-Buddy Sidoarjo.

Untuk sumber daya fisik yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting juga dalam penerapan sebuah kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Bestaria R. K. Bestari And T. Tukiman yang berjudul "Kinerja Kantor Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan", yang menyatakan bahwa sarana prasarana merupakan komponen tambahan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terkait dengan ketersediaan fasilitas dalam pelaksanaan aplikasi *E-Buddy* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungrejo, sudah cukup memadai. Hal ini didukung oleh tersedianya komputer, mesin print, dan pendingin ruangan berupa AC pada ruang administrasi maupun diruangan yang lain. Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini tidak serta merta bergantung dengan fasilitas berupa computer karena aplikasi ini juga dapat diakses secara mudang dengan menggunakan HP yang berbasis android.

C. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dibutuhkan implementator yang mempunyai kemampuan serta kemauan yang kuat agar dapat melaksanakan suatu kebijakan. Dalam implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon dapat dilihat dari sikap pelaksana yang merespon positif dengan adanya penerapan sebuah kebijakan ini, karena dengan adanya aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo kegiatan surat menyurat kedinasan menjadi lebih mudah dan efektif, dengan menggunakan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo pelayanan dapat berjalan dengan cepat karena tidak perlu menunggu tanda tangan kepala desa ataupun mencari keberadaan kepala desa, karena dengan aplikasi ini sudah menggunakan tanda tangan digital,

Respon positif ini disampaikan oleh Kepala Desa Kedungrejo Bapak Yahya Dahari yang mengemukakan bahwa *"Kami sebearnya sangat terbantu dengan adanya aplikasi E-Buddy Sidoarjo ini, terutama dalam hal surat menyurat, perubahan yang sangat jelas dapat kita lihat adalah dari yang dulu kita menerima surat dari kecamatan yang berupa selembaran kertas sekarang cukup dengan mengakses aplikasi E-Buddy Sidoarjo ini kita sudah dapat menegetahuinya, yang kedua dalam hal pelayanan di desa apabila ada warga yang membutuhkan tandatangan saya, sudah tidak perlu mencari cari saya cukup dengan tandatangan elektronik melalui aplikasi E-Buddy ini, pelayanan selesai"* Dari pernyataan tersebut sangat jelas terlihat kesiapan sikap Pemerintah Desa Kedungrejo dalam mendukung implementasi aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini.

Kepala Desa Kedungrejo juga menyampaikan pada saat wawancara terkait kendala yang ditemui pada saat penerapan kebijakan tersebut yakni *"terlepas dari kemudahannya aplikasi ini saya rasa belum dapat diterima oleh seluruh pengguna, karena adab eberapa fitur di aplikasi ini yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya, misalkan fitur disposisi yang sudah jelas ini digunakan untuk saya menugaskan bawahan saya, namun sering kali mereka tidak memberikan tindak lanjut"* Peneliti menemukan bahwa selama ini fitur disposisi yang ada pada aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah desa kedungrejo dalam pengelolaan surat masuk, melainkan system disposisi surat masuk dilakukan didalam *Whatsapp* Grup.

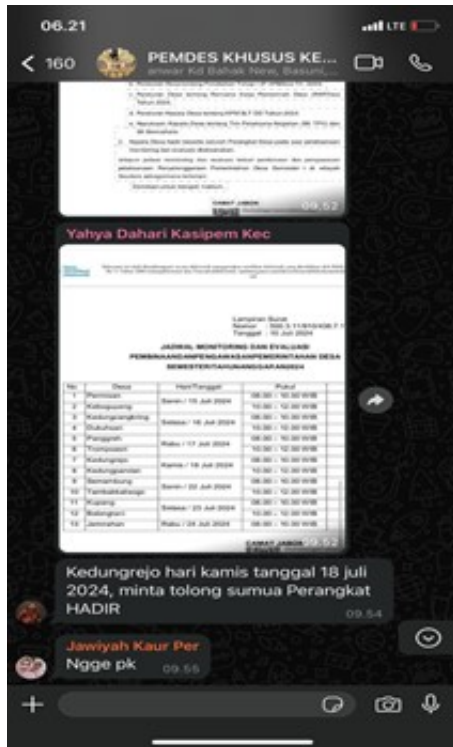


Figure 4. Disposisi Surat Masuk

Selain dari kurangnya kemampuan sumber daya manusia hal ini ternyata juga dapat dipengaruhi oleh sering terjadinya *server error* dari aplikasi *E-Buddy* sehingga admin harus mendownload surat masuk untuk disampaikan ke Kepala Desa untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti sesuai dengan tugas masing-masing perangkat desa. George Edward III dalam penelitian terdahulu oleh An Nisa Nur Amalia, Afifudin, Hayat (2019) yang berjudul *Implementasi E-Documen Dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar (Studi Kasus Kebijakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Bagian Umum Balai Kota Malang, Jawa Timur)* menyatakan bahwa Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Pemahaman terhadap struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi diantara pihak pelaksana dengan implementor kebijakan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga seluruh OPD saling berkoordinasi dan menjalankan fungsi perannya masing-masing dengan baik terkait jalannya aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini. Menurut Edward III, struktur birokrasi adalah faktor keempat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi terdiri dari dua aspek yaitu mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja. SOP berfungsi agar proses di dalam birokrasi dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan penelitian dilapangan diketahui bahwa aparaturnya Pemerintah Desa Kedungrejo kurang memperhatikan Standar Operasional Sistem (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan terkait penggunaan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo khususnya dalam pemrosesan surat dinas, yang hanya menyelaraskan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing aparaturnya pemerintah desa. Pemerintah Desa Kedungrejo tidak menyediakan SOP yang khusus dalam penerapan *E-Buddy* Sidoarjo ini meskipun dengan demikian dalam pelaksanaannya penggunaan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik, di mana pengiriman naskah dinas elektronik harus menggunakan aplikasi surat elektronik dengan alamat URL.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jabon bahwa *“sebagai upaya komitmen kita untuk menjalankan aplikasi E-Buddy Sidoarjo ini kita usahakan selalu memonitoring dan mengevaluasi melalui berbagai media, seperti kita ada grup whatsapp yang anggotanya terdiri khusus operator aplikasi E-Buddy, dan kunjungan kedesa setiap dua kali dalam setahun”*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui penyusunan SOP dan pembagian kerja yang tepat. Pemerintah Desa Kedungrejo harus menciptakan SOP yang jelas dan sesuai dengan Prinsip *Good Governance* dalam penggunaan aplikasi *E-Buddy*. Selain itu, aplikasi *E-Buddy* juga harus diawasi

dengan baik untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif [14]. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Kristyanita Yefani, M. Mas'ud Said, Suyeno pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi E-SURADI (Surat Digital) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang juga menyatakan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi, apabila struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka akan menyebabkan ketidak efektifitasan dan dapat menghambat jalannya sebuah pelaksanaan kebijakan [15].

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik, namun untuk indikator komunikasi masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kegiatan yang dapat menunjang penyampaian informasi terkait aplikasi *E-buddy* Sidoarjo ini seperti bimbingan teknis maupun konsistensi dalam penggunaan aplikasi dalam penyampaian informasi surat dinas karena penyampaian informasi lebih cenderung memanfaatkan fitur *whatsapp grub* daripada fitur disposisi yang telah tersedia pada aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo. Untuk indikator sumber daya manusia yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pengguna aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini masih terdapat setengah dari jumlah keseluruhan aparatur pemerintah desa kedungrejo yang mampu menggunakan aplikasi *E-Buddy* Sidoarjo ini dengan baik sehingga hal ini berpengaruh terhadap indikator disposisi atau sikap pelaksana yang dapat menyulitkan bagi kepala desa untuk meneruskan informasi apabila menerima surat masuk, sedangkan untuk sumberdaya peralatan sudah memadai namun masih terdapat kendala terkait akses internet. Selanjutn yaitu indikator struktur birokrasi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Naskah Dinas Eletronik telah diterapkan di Pemerintahan Desa Kedungrejo yang sekaligus menekankan peran Kepala Desa sebagai apatur tertinggi dalam koordinasi yang terbentuk. Pasal 26 Ayat 2 UU Nomor 6 Tentang Desa [15] yang menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Aparatur Pemerintah Desa ini menjadi dasar bagi Ppemerintah Desa Kedungrejo dalam hal pengangkatan birokrasi serta hal ini juga menjadi dasar untuk aparatur pemerintah Desa tidak melanggar aturan yang ada.

References